

BAB IV

STRATEGI KEMENPORA MENGHADAPI SANKSI FIFA

Perang kedaulatan antara FIFA dengan kedaulatan pemerintah semakin menjadi jadi semenjak dijatuhkannya sanksi pembekuan terhadap PSSI. Tujuan negara adalah wujud dari pelaksanaan politik luar negeri dalam memperbaiki persepakbolaan Indonesia, sedangkan tujuan FIFA adalah memajukan persepakbolaan dunia tanpa campur tangan dari kekuatan politik dan aktor-aktor negara. Jelas terdapat perbedaan pandangan antara negara dan organisasi internasional tersebut, disisi lain pemerintah menginginkan perombakan dalam tubuh PSSI yang kurang akuntabel dan transparan, sedangkan dikubu yang lainnya FIFA tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk intervensi dari pihak ketiga kepada setiap anggota asosiasi dalam mengurus urusan internalnya.

A. Langkah-langkah Strategis Kemenpora dalam Menghadapi Sanksi FIFA

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) segera merespons sanksi FIFA kepada sepakbola Indonesia dengan melakukan sejumlah langkah strategis. Hal ini seperti diungkapkan oleh Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Gatot S Dewa Broto.

“Kami bergerak cepat agar mendapatkan grand strategy yang lebih komprehensif, transparan, objektif dan dengan target total prestasi yang signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan sepakbola Indonesia”¹

¹ <http://poskotanews.com/2015/06/01/kena-sanksi-fifa-kemenpora-lakukan-langkah-strategis/>
diakses 2 Januari 2017

Terkait dengan kompetisi, Gatot menjelaskan Kemenpora melalui Tim Transisi akan segera menggulirkan kembali berbagai tingkatan kompetisi baik untuk tataran profesional dan amatir. Hal Ini perlu ditekankan, karena tidak semata-mata terkait dengan aspek teknis sepakbola, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, kreativitas masyarakat dan dimensi dinamika kemaslahatan umum yang menyertainya. PSSI dan Kemenpora serta KOI juga tetap bersinergis agar sanksi FIFA ini tidak terlalu lama diberlakukan.

Dalam menghadapi sanksi FIFA terhadap PSSI, Menpora melakukan beberapa langkah untuk mengantisipasi dampak dari sanksi yang diberikan oleh FIFA. Langkah ini dilakukan sebagai respon atas diberikannya sanksi FIFA kepada PSSI. Dengan adanya langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Menpora diharapkan sanksi yang diberikan oleh FIFA dapat segera dicabut. Langkah tersebut meliputi:

1. Melakukan komunikasi dengan pemerintah dan FIFA terkait alasan pembekuan PSSI oleh Menpora. Hal ini dilakukan pada pertemuan yang dihadiri oleh Presiden Jokowi, perwakilan FIFA serta Menpora Imam Nahrawi.
2. Mengkoordinasikan langkah selanjutnya setelah PSSI di beri sanksi oleh FIFA dengan Tim Transisi.
3. Kemenpora akan bersinergis dengan berbagai lembaga terkait untuk segera menyempurnakan Blue Print pembenahan sepakbola nasional dalam waktu

secepatnya sehingga dapat diperoleh grand strategi yang lebih komprehensif, transparan, obyektif dan dengan target total prestasi yang signifikan dalam penataan ulang sistem pengelolaan persepakbolaan nasional Indonesia

4. Tertanggal 5 Mei 2016 Menpora menandatangani surat pencabutan sanksi yang diberikan kepada PSSI. Pencabutan sanksi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya:
 - a. Mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan sanksi yang diberikan kepada PSSI.
 - b. Bentuk penghargaan terhadap FIFA sebagai otoritas tertinggi sepakbola dunia.
 - c. Sebagai bentuk respon terhadap permintaan berbagai pihak pecinta sepakbola yang menginginkan agar tata kelola sepak bola segera terwujud melalui pencabutan sanksi terhadap PSSI.
5. Tertanggal 10 Mei 2016 Menpora resmi mencabut sanksi yang diberikan kepada PSSI dan dilanjutkan laporan terhadap presiden. Hasil dari pertemuan antara Menpora dengan Presiden Joko Widodo dihasilkan tiga opsi bagi kelanjutan PSSI. Tiga opsi itu adalah tetap mempertahankan SK Pembekuan PSSI, mencabut SK pembekuan PSSI, atau merevisi SK Pembekuan.
6. Tertanggal 13 Mei 2016, FIFA mencabut sanksi yang diberikan kepada PSSI menyusul pencabutan sanksi oleh Menpora. Pengumuman ini diberikan

bertepatan dengan Kongres FIFA yang dilaksanakan di Meksiko.

7. Tertanggal 25 Mei 2016, Menpora melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta PSSI. Menpora juga melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Hasil dari pertemuan ini adalah Menpora mengawal perubahan tata kelola di PSSI yang lebih transparan dan akuntabel.

Pemerintah Indonesia melalui Kemenpora berupaya dalam menyelesaikan konflik PSSI. Upaya pemerintah ini dapat terwujud disebabkan izin dari FIFA agar pemerintah ikut menyelesaikan konflik PSSI yang tidak kunjung selesai. FIFA berkomunikasi kepada pihak Menpora bahwa jika permasalahan sepakbola di Indonesia tidak mendapatkan titik terang, maka FIFA akan memberikan sanksi tegas kepada Indonesia melalui agenda dalam rapat Exco FIFA. Berdasarkan surat yang diberikan FIFA kepada pemerintah Indonesia menjelaskan bahwa FIFA telah memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan solusi yang paling tepat didalam menyelesaikan konflik tersebut. Salah satunya dengan melibatkan pemerintah, karena selama ini pihak dari PSSI selalu menganggap anti terhadap pemberian solusi oleh pemerintah. Dalam hal ini disebabkan persepakbolaan Indonesia dan PSSI tetap merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia, maka pemerintah berusaha untuk menyelesaikan persoalan konflik dualisme

tersebut dengan membentuk *Task Force*².

Didalam meningkatkan prestasi tim nasional Indonesia di event internasional, selain menyelesaikan konflik dualisme tersebut pemerintah Indonesia berupaya menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain yang mencakupi bidang olahraga dalam hal ini sepakbola. Banyak negara-negara lain yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang membahas hubungan kerja sama bilateral di kedua belah pihak negara yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Pemerintah Indonesia memanfaatkan hal tersebut di sektor sepakbola pula. Indonesia menjalin kerja sama dengan Argentina dalam hal pengiriman anak berbakat Indonesia ke Argentina dan kerja sama kepelatihan antara Indonesia dan Argentina. Selain itu Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Inggris melalui pertandingan persahabatan melawan Arsenal. Pertandingan tersebut sangat berarti bagi Indonesia disebabkan timnas Indonesia dapat bertanding melawan klub level dunia. Selain pengalaman berharga, pertandingan tersebut pun menjadi upaya diplomasi untuk memperkenalkan budaya Indonesia, sebab klub Arsenal sebelum datang ke Indonesia mempelajari terlebih dahulu mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Indonesia pun menjalin kerja sama dengan Serbia dalam hal memperoleh informasi mengenai pemenuhan infrastruktur yang menunjang bagi atlet untuk berprestasi di dunia

² Marizky Harro Uasni. 2014. Upaya Diplomasi Publik Pemerintah Indonesia Dalam Memperbaiki Citra Sepakbola Indonesia Di Dunia Internasional(Studi Kasus Dualisme Kepengurusan PSSI Tahun 2011-2012).eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2014, 2 (1) : 183 : 194

Internasional.³

B. Keputusan Menpora mencabut Sanksi terhadap PSSI

Sanksi FIFA yang jatuh pada 30 Mei 2015 sendiri diberlakukan setelah pemerintah Indonesia membekukan PSSI. Visi yang tidak sejalan untuk menjalankan roda kompetisi resmi Liga Super Indonesia akhirnya membuat sepak bola Indonesia mati suri. Ketidakpercayaan pemerintah terhadap kredibilitas PSSI dibalas dengan sikap ngotot PSSI yang berlindung di balik aturan FIFA, bahwa keterlibatan pihak ketiga - dalam hal ini pemerintah - adalah tidak dibenarkan, dan menciptakan pertarungan tak berujung.

Sebuah angin segar pun dihembuskan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memberikan opsi pencabutan pembekuan PSSI dengan syarat. Dalam pertemuan yang dihadiri Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI, Agung Gumelar, pada 24 Februari 2016 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi di Istana Merdeka, Joko Widodo dikabarkan bersedia mencabut pembekuan PSSI asalkan pihak federasi bersedia menggelar KLB (Kongres Luar Biasa) dengan agenda pergantian Ketua Umum PSSI.⁴

³ Ibid, hal 192

⁴ <http://www.fourfourtwo.com/id/features/3-hal-yang-harus-dilakukan-pssi-jika-fifa-mencabut-sanksi>, diakses jam 10.58 WIB, tanggal 30 November 2016

Menpora Imam Nahrawi menuturkan ada tiga hal utama yang jadi pertimbangan. Pertama, menghargai keputusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukannya terkait putusan banding yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negeri (PT TUN) tertanggal 28 Oktober 2015 dan keputusan PTUN tertanggal 14 Juli 2015. Keputusan kasasi MA itu dijatuhkan pada Senin (7/3/2016).

"Kami taat hukum dan menghargai putusan Mahkamah Agung. Pemerintah harus sesegara mungkin mencabut keputusan pembekuan PSSI itu," jelas Menpora.

Kedua, menghargai komitmen FIFA. Menpora mengungkapkan pihaknya menghargai surat-surat yang dikirimkan FIFA baik secara langsung kepada dirinya atau kepada Menteri Sekretaris Negara.

"Salah satu isi surat itu adalah FIFA akan mengawal perubahan sepak bola di Indonesia. Ini yang akan kami kawal bersama. Pemerintah sangat menghargai upaya FIFA-AFC untuk mengawal perubahan itu," ucapnya.

Ketiga, pemerintah menghargai dan menghormati harapan, niat, kehendak pencinta sepak bola di Tanah Air untuk segera dilakukan perubahan yang lebih baik untuk tata kelola sepak bola nasional.

Dalam poin ketiga ini, Menpora Imam Nahrawi menekankan komitmen pemilik suara yang telah meminta digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI. Seperti diketahui, pekan lalu sebanyak 85 voter PSSI secara resmi mengajukan KLB.

"Komitmen itu tetap harus dijaga. Pemerintah ingin kepercayaan ini dijaga bersama. Pemerintah kepada FIFA, FIFA kepada pemerintah, FIFA kepada pemilik suara. Perubahan tak boleh berhenti di sini dan harus dijaga bersama,"⁵

C. Keputusan FIFA mencabut Sanksi terhadap PSSI

Pada tanggal 13 Mei 2016, FIFA secara resmi telah mencabut sanksi yang ditujukan kepada PSSI. Keputusan pencabutan sanksi ini diberlakukan saat congress anggota Komite Eksekutif FIFA ke 66 dilaksanakan di Meksiko. FIFA mencabut sanksi yang diberikan kepada PSSI karena FIFA sudah mendapat laporan bahwa Kemenpora telah mencabut sanksi administratif yang diberikan kepada PSSI.

"beberapa saat sebelum kongres, anggota Komite Eksekutif FIFA sudah melakukan pertemuan dan memutuskan, sanksi penangguhan terhadap Indonesia dicabut," jelas Infantino ⁶.

Pencabutan sanksi FIFA berdampak pada kegiatan PSSI di kancah sepakbola internasional. Berikut beberapa dampak yang muncul:

- a. Timnas Indonesia dapat mengikuti laga pertandingan sepakbola internasional yang masih tersisa di tahun 2016. Salah satunya adalah Piala AFF 2016 di Myanmar dan Filipina.
- b. Dibubarkannya Tim Transisi. Dengan dicabutnya sanksi FIFA terhadap PSSI tentu akan mengembalikan semua kewenangan dan tanggung jawab yang

⁵ <http://www.bola.com/indonesia/read/2504030/3-pertimbangan-menpora-cabut-sk-pembekuan-pssi>, diakses tanggal 31 November 2016, 09.58 WIB.

⁶ <http://bola.kompas.com/read/2016/05/13/23004988/FIFA.Resmi.Cabut.Sanksi.terhadap.Indonesia>, diakses tanggal 20 Januari 2017, 09.10 WIB.

dimiliki oleh PSSI, hal yang sebelumnya dipegang oleh Tim Transisi. Dengan SK Pencabutan dari Kemenpora yang diikuti pencabutan sanksi dari FIFA, maka kewenangan dan tanggung jawab kembali menjadi milik PSSI dan Tim Transisi yang selama ini bertugas mengambil alih kewenangan dan tanggung jawab PSSI dinyatakan bubar.

- c. Indonesia dapat mencalonkan diri menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023. Seperti yang telah diketahui bahwa Indonesia melalui PSSI telah mengajukan diri menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023. Pemerintah melalui Kemenpora pun telah menyatakan dukungannya atas putusan ini. Dengan adanya pencabutan sanksi oleh FIFA maka peluang Indonesia untuk menjadi Tuan Rumah Piala Asia 2023 dapat terbuka kembali.